



Kaji Kebijakan Ganjil Genap di Malioboro

● PPKM di DIY Naik ke Level 3 Saat Nataru

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah DIY bersama kepolisian tengah mengkaji penerapan kebijakan ganjil-genap pelat nomor kendaraan yang melintas di wilayah ini. Hal ini untuk mengurangi jumlah masyarakat yang berkunjung di tempat-tempat wisata.

"Nanti kita akan atur ganjil genap untuk destinasi wisata. Nanti kita arahkan untuk pengunjung sisi selatan misalnya itu ganjil di sisi utara genap," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, Kamis (25/11).

Salah satu kawasan yang bakal menerapkan skema ganjil genap adalah Malioboro. Sebab, ikon Kota Yogyakarta itu selalu dikerubungi wisatawan tiap malam pergantian tahun. "Kita juga akan menerapkan itu, khusus sepeda motor nggak usah. Ini lagi mengkaji pengatur-

annya seperti apa," paparnya.

Lebih jauh, dalam Inmendagri tersebut pemerintah menerbitkan larangan mudik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum saat libur Nataru. Kendati demikian pemerintah menyatakan tidak akan ada penyekatan di wilayah perbatasan. Larangan itu bertujuan mencegah atau mengurangi kluster penularan Covid-19 di lingkungan keluarga.

"Kita lakukan (pemeriksaan) sampel saja atau acak. Bisa saja kendaraan umum kecil atau sampel kendaraan pribadi boleh saja yang penting kita atur supaya pengambilan sampel tidak menimbulkan kemacetan," jelasnya.

Aji menuturkan, sesuai dengan keputusan Inmendagri, tempat wisata di DI Yogyakarta diizinkan buka saat li-

bur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun pembukaan dilakukan secara terbatas dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Misalnya, optimalisasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk skrining wisatawan maupun melakukan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50 persen dari total kapasitas.

Jangan khawatir

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga menyatakan siap menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di wilayahnya saat libur Nataru. "Ya nggak papa, dengan PPKM level 3 kita kembali agak memberikan pengetatan, tapi pengetatannya seperti apa saya belum tahu. Itu tergantung keputusan dari Jakarta," terang Sri Sultan. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005